



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PUSAT STATISTIK (BPS)
UNIT KERJA : BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI JAWA TIMUR

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SATRIYO WIBOWO**
2. Jabatan : **KEPALA**
3. NHK : **186449**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 3.440.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 180 m²/72 m² di KAB / KOTA SIDOARJO, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 81 m²/36 m² di KAB / KOTA SIDOARJO, HASIL SENDIRI Rp. 425.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 142 m²/220 m² di KAB / KOTA KOTA SURAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 22 m²/22 m² di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 315.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 33.01 m²/33.01 m² di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
6. Tanah Seluas 1000 m² di KAB / KOTA MAGELANG, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 552.500.000**

1. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
2. MOBIL, FORD ECOSPORT Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
3. MOBIL, TOYOTA RUSH 1.5 MT F800REGMGFJ Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 212.500.000
4. MOBIL, TOYOTA YARIST 1.5 MT NSP151R Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 280.915.968**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	649.545.008
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	728.979.038
F. HARTA LAINNYA	Rp.	180.000.000
Sub Total	Rp.	5.831.940.014
III. HUTANG	Rp.	134.947.608
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	5.696.992.406

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.